

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemimpin dalam menyusun agenda pengembangan pendidikan formal di MTs Safinatun Naja dilakukan melalui pendekatan visi keislaman, musyawarah kolektif, dan respon terhadap kebutuhan aktual. Pimpinan menempatkan pengembangan MTs sebagai prioritas strategis, dengan memperhatikan keseimbangan antara kurikulum agama dan umum, keterbatasan fasilitas, serta partisipasi guru, santri, dan masyarakat. Agenda yang disusun bersifat adaptif, partisipatif, dan berkesinambungan, sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan identitas pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan menjadi faktor sentral dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan pendidikan formal di lingkungan pesantren.
2. Evaluasi pemimpin dalam menyusun agenda pengembangan pendidikan formal di MTs Safinatun Naja dilaksanakan secara rutin, sistematis, dan berbasis musyawarah. Evaluasi mencakup aspek kurikulum, kinerja guru, prestasi santri, fasilitas belajar, hingga pembiayaan, dengan melibatkan kepala madrasah, guru, santri, serta wali santri. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan menyusun agenda baru, sehingga agenda pengembangan selalu relevan dengan kebutuhan nyata. Evaluasi juga menekankan aspek nilai, seperti kedisiplinan, akhlak, dan keteladanan, sehingga kebijakan tidak hanya teknokratis tetapi juga bermuatan etika Islam. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol, pembelajaran, dan inovasi dalam menjaga efektivitas pengembangan pendidikan formal di pesantren.

B. Implikasi Penelitian Implikasi

1. Teoretik

- a. Penelitian ini memperkuat teori kebijakan publik (Winarno, Dunn, Parsons, Subarsono) bahwa agenda setting dan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan. Temuan menunjukkan kedua tahap itu berjalan dalam konteks pesantren dengan nuansa keislaman.
- b. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa efektivitas kebijakan pendidikan ditentukan oleh sistem evaluasi yang terukur. Evaluasi di Safinatun Naja membuktikan hal itu, meski dilakukan dengan pendekatan sederhana berbasis musyawarah dan laporan.
- c. Penelitian ini memperkaya teori manajemen pondok pesantren dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan pesantren mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam kebijakan formal pendidikan modern.
- d. Temuan juga memberi kontribusi pada literatur tentang integrasi kurikulum pesantren dengan menambahkan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kurikulum agama dan umum.²⁶
- e. Secara umum, penelitian ini menawarkan model teoretik bahwa siklus kebijakan publik dapat diterapkan dalam pendidikan pesantren dengan adaptasi berbasis nilai, musyawarah, dan partisipasi masyarakat.

2. Implikasi Praktik

- a. Bagi pimpinan pesantren, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan agenda pengembangan MTs yang partisipatif dengan melibatkan guru, santri, dan wali santri agar kebijakan lebih responsif.
- b. Praktik evaluasi perlu dilakukan secara lebih terstruktur dengan instrumen baku

²⁶Hadori, 2010.

(misalnya indikator kinerja guru, santri, dan kurikulum) agar hasilnya lebih terukur dan mudah dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

- c. Guru dan kepala madrasah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pijakan untuk meningkatkan peran mereka dalam memberikan masukan bagi agenda pengembangan pendidikan formal di pesantren.
- d. Bagi masyarakat/wali santri, hasil penelitian memberi pemahaman bahwa peran aktif mereka dalam forum evaluasi berkontribusi langsung terhadap kualitas dan keberlanjutan pendidikan formal di pesantren.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pesantren lain yang ingin mengembangkan pendidikan formal dengan menekankan keseimbangan antara efisiensi manajerial, evaluasi berkesinambungan, dan nilai-nilai keislaman.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan pesantren, disarankan untuk melembagakan forum evaluasi berkala dengan instrumen yang lebih terstruktur, agar penyusunan agenda pengembangan pendidikan formal semakin terukur dan akuntabel.
2. Bagi kepala madrasah dan guru, disarankan meningkatkan dokumentasi capaian kurikulum dan kinerja secara berkala sebagai bahan masukan yang lebih objektif bagi kebijakan pimpinan.
3. Bagi wali santri dan masyarakat, disarankan agar lebih aktif berpartisipasi dalam forum musyawarah dan evaluasi yang diselenggarakan pesantren, mengingat keterlibatan mereka terbukti berkontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan formal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan

pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih terukur pengaruh kebijakan pimpinan terhadap mutu pendidikan formal, serta memperluas cakupan penelitian pada pesantren lain dengan karakteristik yang berbeda.

